



BPK Beri Rapor Merah untuk DKI

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan beberapa ketidakberesan dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014. Atas dasar itu, BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian (WDP)” untuk laporan keuangan tahun lalu. “Predikat ini tak berbeda dengan laporan keuangan pada 2013,” kata Anggota V BPK RI, Moermahadi Soeja Djanegara, saat Rapat Paripurna DPRD di Kebon Sirih, kemarin.

Beberapa temuan BPK yang mengakibatkan DKI mendapat rapor merah antara lain sensus aset yang masih berantakan. Moermahadi juga mengatakan, ada penghapusan aset tetap senilai Rp 168,01 miliar yang dinilai tak sesuai dengan prosedur. Penghapusan aset tidak berdasarkan usulan dari satuan kerja perangkat daerah pengguna barang dan SK Gubernur.

Begitu juga dengan aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebesar Rp 3,58 triliun dianggap tidak wajar, sehingga berisiko pindah tangan. Selain itu, kata Moermahadi, ada 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah memikirkan cara untuk memperbaiki laporan keuangan itu. Salah satu cara yang ditempuhnya ialah merekrut pegawai BPK dan ditempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selain itu, dia meminta laporan keuangan dibuat dengan sistem akuntansi aktual.

● ERWAN HERMAWAN | RAYMUNDUS RIKANG